



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA TA. 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

Jln. Mahkota Kuala Meurisi, Kabupaten Aceh Jaya
Telp/Fax. (0654) 2210236, Email: bpkk.acehjaya@gmail.com, Kode Pos: 23654

Calang

BERITA ACARA REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN SKPK
TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Pada Hari ini Jum'at Tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami telah melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPK Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Pendapatan LRA sebesar Rp. 180,230,000.00-, Belanja sebesar Rp. 47,488,318,349.00,- dan Pembiayaan Neto sebesar Rp. 0,-
 - b. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar (83,479,153,672.00),- dan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar (76,490,010,567.00),-
 - c. Pendapatan Operasional sebesar Rp. 180,230,000.00, Beban sebesar Rp. 63,464,385,348.00, Sulplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp. 0,- dan Beban Luar Biasa Rp. 0,-
 - d. Ekuitas Awal sebesar Rp1.241.228.013.848,70 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 1,416,265,210,572.48
 - e. Jumlah Aset sebesar Rp. 1,416,295,570,929.89,- dan Kewajiban sebesar Rp. 3,033,286.00,-
 - f. Jumlah persediaan sebesar Rp. 5,708,200.00,-
2. Demikian Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Petugas Rekonsiliasi,

PPK- Kepala Sub.
Bagian Keuangan,

Petugas Satker BPKK

(Junaidi, S.T., M.T)
NIP. 19730419 200604 1 001

(Rahmad Akbar)
NIP. 19910529 202021 1 002

Menyetujui,

Kasubbid Pembukuan
dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi
BPKK

Firda Rahmadani, SE. Ak
NIP. 19810620 201003 1 001

Irwanda, SE., M.Si. Ak
NIP. 19820605 200504 1 002

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Jaya

Azhari, SE, M.Si

NIP. 19680309 199803 1 006

Tembusan:

1. Bupati Aceh Jaya Di Calang;
2. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
4. Pertinggal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya

Laporan keuangan merupakan laporan yang berstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dimaksud sebagai wujud tanggung jawab Kepala SKPD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan. Disamping itu, Laporan Keuangan SKPD merupakan alat kontrol untuk meneliti, menguji dan menilai terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD tahun berkenaan.

Mengingat sistem yang diterapkan selama ini belum dapat menjembatani penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka dilakukan pendekatan praktis yaitu dengan cara mengumpulkan, menganalisa, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti;
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
- k. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota;
- m. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan pemamfaatan Dana Kafitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota ;
- n. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 64 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya

Catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 7 bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang : maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang berisikan tentang : Ekonomi makro, Kebijakan keuangan, Indikator pencapaian target kinerja APBD. Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang berisikan tentang Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab IV Kebijakan akuntansi yang berisikan tentang Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya,

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabuapten Aceh Jaya, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabuapten Aceh Jaya, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabuapten Aceh Jaya. Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabuapten Aceh Jaya yang berisikan tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dana, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas Akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis aktual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabuapten Aceh Jaya. Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabuapten Aceh Jaya dan Bab VII Penutup.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dalam pencapaian target kinerja adalah:

1. Dana APBN terlambat ditransfer ke Daerah sehingga terhambatnya pelaksanaan pekerjaan.
2. Kekurangan Jumlah Pegawai di masing-masing Bidang, hal ini disebabkan adanya pegawai yang mutasi keluar.
3. Kurangnya disiplin waktu bagi rekanan dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan tepat waktu.
4. Kondisi alam yang sering terjadi Banjir sehingga Realisasi Pekerjaan Fisik mengalami keterlambatan/Deviasi.
5. Keterlambatan Lelang Pekerjaan sehingga waktu pelaksanaan SPK/Kontrak pekerjaan sangat singkat.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. LRA

3.1.1. Pendapatan

Dana retribusi Pemakaian Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dengan Jumlah Anggaran Rp. 461.440.000,00 dengan jumlah realisasi Rp. 180.230.000,00, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan jumlah anggaran Rp. 42.840.000,00 dengan jumlah realisasi Rp. 9.005.000,00, Retribusi Jasa Usaha dengan jumlah anggaran Rp. 403.600.000,00 dengan jumlah realisasi 145.800.000,00, Retribusi Perizinan Tertentu dengan jumlah anggaran Rp. 15.000.000,00 dengan jumlah realisasi Rp. 25.425.000,00.

3.1.2. Belanja

Perbandingan realisasi kelompok belanja terhadap total belanja dan kontribusinya secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Nomor Urut	Uraian	Anggaran	Jumlah Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA	83,940,593,672.00	76,670,240,567.00	91.34
1	BELANJA OPERASI	29,498,178,184.00	29,181,922,218.00	98.93
1.1	Belanja Pegawai	5,939,066,364.00	5,735,432,370.00	96.57
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,047,891,600.00	996,258,469.00	95.07
1.3	Belanja Hibah	15,006,734,220.00	14,950,521,590.00	99.63
1.4	Belanja Bantuan Sosial	7,504,486,000.00	7,499,709,789.00	99.94
2	BELANJA MODAL	54,442,415,488.00	47,488,318,349.00	87.23
2.1	Belanja Tanah	-	-	-
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	536,239,000.00	523,554,000.00	97.63
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	9,304,553,000.00	9,259,634,000.00	99.52
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	44,601,623,488.00	37,705,130,349.00	84.54

Dari tabel di atas dapat dikemukakan bahwa proporsi realisasi belanja pada anggaran dan pendapatan belanja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya di dominasi oleh belanja Operasi Rp. 29,181,922,218.00 (98.93%), terdiri dari belanja Pegawai Rp. 5,735,432,370.00 (96.57%), Belanja Barang dan Jasa Rp. 996,258,469.00 (95.07%), Belanja Hibah Rp. 14,950,521,590.00 (99.63%), Belanja Bantuan Sosial Rp. 7,499,709,789.00 (99.94%), kemudian disusul Belanja Modal Rp. 47,488,318,349.00 (87.23%), yang terdiri dari belanja Peralatan dan Mesin Rp. 523,554,000.00 (97.63%) Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 9,259,634,000.00 (99.52%), Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Rp. 37,705,130,349.00 (84.54%).

(1). Belanja Operasi

(1.1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun 2023 sebesar Rp. 5,735,432,370.00 atau 96.57% dari pagu anggaran sebesar Rp. 5,939,066,364.00 Realisasi tersebut merupakan jumlah seluruh pengeluaran yang diperuntukkan bagi PNS.

(1.2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2023 sebesar Rp. 996,258,469.00 atau 95.07 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,047,891,600.00. Realisasi tersebut merupakan jumlah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa antara lain untuk belanja bahan habis pakai, belanja bahan material, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan lain-lain dalam tahun Anggaran 2023.

(1.3) Belanja Hibah

Realisasi belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp. 14,950,521,590.00 atau 99.63 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 15,006,734,220.00

(1.4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp. 7,499,709,789.00 atau 99.94 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 7,504,486,000.00

(2). Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun 2023 sebesar Rp. 47,488,318,349.00 atau 87.23 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 54,442,415,488.00 realisasi tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Lainnya.

(2.1) Realisasi Belanja Tanah Tahun 2023 sebesar 0

(2.2) Realisasi belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar

Rp. 523,554,000.00 atau 97.63 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 536,239,000.00
Belanja ini diperoleh dari:

- Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp. 112,804,000.00 dengan rincian sebagai Berikut:
 - Pengadaan AC (3 Unit) Rp. 16.350.000.00
 - Meja Rapat Pejabat (1 Unit) Rp. 4.884.000.00
 - Belanja Lemari es (1 Unit) Rp. 1.950.000.00
 - Pengadaan CCTV Full set Rp. 16,800.000.00
 - Kursi (39 Unit) Rp. 34.320.000.00
 - Meja (10 Unit) Rp. 18.750.000.00
 - Sofa (1 Unit) Rp. 9.750.000.00

(2.3). Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp. 9,259,634,000.00 atau 99.52 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 9,304,553,000.00.

(2.4). Realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 Rp. 37,705,130,349.00 atau 84.54 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 44,601,623,488.00, dengan Rincian Sebagai Berikut :

- Jalan dan Jembatan Rp. 29,814,633,958.00 (81.58%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 36,547,926,488.00.
- Bangunan Air Rp. 1,277,700,000.00 (99.60%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,282,832,000.00.
- Jaringan Rp. 6,612,796,391.00 (97.67%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 6,770,865,000.00.

c. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun 2023 sebesar Rp. 0,- atau tidak ada belanja aset tetap lainnya.

d. Belanja Aset Lainnya

Realisasi belanja aset lainnya Tahun 2023 sebesar Rp. 0,- atau tidak ada belanja aset tetap lainnya.

3.2. Laporan Operasional

4.2.1 Pendapatan- LO

Pendapatan LO pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uraian	2023
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>	
PENDAPATAN-LO	461.440.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH- LO	180,230,000.00
Pendapatan Pajak Daerah	-
Pendapatan Retribusi Daerah	180,230,000.00
Lain-lain PAD yang Sah	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	180,230,000.00

Pendapatan LO pada tahun 2023 Sebesar Rp. **180,230,000.00** nilai ini diperoleh dari pendapatan retribusi Alat Berat dan Alat-alat Laboratorium sebesar Rp. 180,230,000.00

- Pendapatan retribusi-LO berasal dari retribusi Jasa Umum Sebesar Rp. 9.005.000,00 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu sebesar Rp.

9.005.000,00, Retribusi Jasa Usaha yaitu sebesar Rp. 145.800.000,00, dan Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 25.425.000,00

3.2.2 Beban

Beban Operasi pada tahun 2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Uraian	Tahun 2023 (Rp.)
BEBAN OPERASI	
Beban Pegawai	5,731,582,596.00
Beban Persediaan	-
Beban Barang dan Jasa	997,410,917.00
Beban Pemeliharaan	-
Beban Perjalanan Dinas	-
Beban Bunga	-
Beban Subsidi	-
Beban Hibah	14,950,521,590.00
Beban Bantuan Sosial	7,499,709,789.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-
Beban Penyisihan Piutang	-
Beban Transfer	-
Beban Lain-lain	-
Jumlah Beban Operasi	29,179,224,892.00

3.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas akhir pada tahun 2023 sebesar Rp. 1,416,265,210,572.48

➤ **Ekuitas awal**

Ekuitas awal Tahun 2022 sebesar Rp. 1,403,492,677,800.04 menjadi ekuitas awal pada tahun 2023.

➤ **Surplus/defisit-LO**

Surplus/ defisit LO sebesar Rp. (63,284,155,348.00) berasal dari pendapatan dikurangi beban pada laporan operasional.

➤ **Koreksi ekuitas lainnya**

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. (61,371,196.56)

3.4 NERACA

3.4.1 Kas di Bank

Saldo kas/Bank per 31 Desember 2023 sebesar 0 yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Uang Tunai di Bank	Rp. -
2.	Kas Bendahara Penerimaan	Rp. -
3.	Kas Bendahara Pengeluaran	Rp. -
4.	Kas di BLUD	Rp. -

➤ Piutang

Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11,903,116.00

Penyisihan Piutang sebesar Rp. 0

3.4.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan merupakan saldo hasil pemeriksaan persediaan (stock opname) per 31 Desember 2023 adalah Rp. 5,708,200.00,-

3.4.3 Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Saldo Aset tetap per 31 Desember 2023 Rp. 1,370,728,826,017.89

Uraian	Nilai (Rp)
1. Tanah	Rp. 78,149,842,614.89
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 11,713,451,530.67
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 78,545,392,526.00
4. Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 1,351,656,773,463.57
- Jalan dan Jembatan	Rp. 1,007,650,491,334.57
- Bangunan Air (Irigasi)	Rp. 245,055,721,873.00
- Instalasi	Rp. 11,367,170,043.00
- Jaringan	Rp. 87,583,390,213.00

1. Tanah

Saldo aset tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 78,545,392,526.00 tidak mengalami peningkatan.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 Rp. 11,713,451,530.67 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Peralatan dan Mesin	
- Alat-alat Berat	Rp. 8,027,099,000.00
- Alat-alat Angkutan	Rp. 1,013,033,666.67
- Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 1,303,464,864.00
- Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp. 15,850,000.00
- Alat Ukur	Rp. 303,600,000.00
- Alat Laboratorium	Rp. 342,755,000.00
- Komputer	Rp. 694,899,000.00
- Alat Eksplorasi	Rp. 12,750,000.00

3. Gedung dan Bangunan

Saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 Rp. 78,545,392,526.00

terdiri dari :

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2022 sebesar Rp. 78,545,392,526.00

Uraian	Nilai (Rp)
Bangunan Gedung	Rp. 77,783,567,526.00
Bangunan Monumen	Rp. 761,825,000.00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1,351,656,773,463.57 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi	
- Jalan dan Jembatan	Rp. 1,007,650,491,334.57
- Bangunan Air (Irigasi)	Rp. 245,055,721,873.00
- Instalasi	Rp. 11,367,170,043.00
- Jaringan	Rp. 87,583,390,213.00

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo KDP per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 149,525,048,373.43

6. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 desember 2022 sebesar Rp. (298,861,682,490.67)

3.4.4 Kewajiban

Nilai Kewajiban Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3,033,286.00

3.2 Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.2.1 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak mungkin, maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan

biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tersebut. Jika Gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan melalui biaya kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

3.2.2 Peralatan dan Mesin

Biaya peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang bersal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, setra biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, dan pengawasan, biaya perizinan dan konsultan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan dan mesin tersebut.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu :

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada.
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
- d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.
- e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.
- f. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada neraca.
- g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan
- h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan suatu laporan yang disusun berdasarkan hasil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memuat pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari pos Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan informasi pelaksanaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mengingat sistem yang diterapkan selama ini belum dapat menjembatani penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka dilakukan pendekatan praktis yaitu dengan cara mengumpulkan, menganalisa, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya yang bersifat membantu, menjelaskan dan menjadi suatu bukti atas pelaporan keuangan yang dibuat, sehingga menghasilkan suatu Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belumlah sempurna layaknya sebuah laporan keuangan sebagaimana tuntutan peraturan perundang-undangan, tetapi informasi yang disajikan telah disusun dengan kualitas sumber daya aparatur yang tersedia di SKPD. Kami berharap Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2023 Untuk kesempurnaan atas laporan ini, kami juga sangat mengharapkan masukan, saran dan pembinaan yang berkelanjutan dari PPKD ataupun instansi terkait untuk perbaikan-perbaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Calang, 12 Januari 2024

Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Kab. Aceh Jaya

HERI ETIKA, S.T., M.Si.
Nip. 19711228 200604 1 002

LAMPIRAN IV : SURAT BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : KU. 900/ /2009
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran : (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan.

Calang, 12 Januari 2024

KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN ACEH JAYA

HERI ETIKA, S.T., M.Si.
Nip. 19711228 200604 1 002



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester I dan II (Januari s/d Desember) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari.

- A. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran
- B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- C. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
- D. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Awal
- E. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran Keuangan secara Layak sesuai standar Pemerintah.

Calang, 12 Januari 2024
KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN ACEH JAYA

HERI ETIKA, S.T., M.Si.
Nip. 19711228 200604 1 002

KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

U R A I A N	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	-	61,371,196.56
Kas di Kas Daerah	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di BLUD	-	-
Kas Dana BOS	-	-
Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	-	-
Kas Lainnya	-	61,371,196.56
Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak	-	-
Piutang Retribusi	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
Piutang Lainnya	11,903,116.00	11,903,116.00
Penyisihan Piutang	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Persediaan	5,708,200.00	5,971,000.00
Aset Untuk Dikonsolidasikan	-	-
Jumlah Aset Lancar	17,611,316.00	79,245,312.56
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non permanen		
Investasi kepada BUMN	-	-
Investasi kepada BUMD	-	-
Investasi dalam Obligasi	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
Dana Bergulir	-	-
Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Investasi Permanen	-	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
ASET TETAP		
Tanah	78,149,842,614.89	78,149,842,614.89
Tanah	78,149,842,614.89	78,149,842,614.89
Peralatan dan Mesin	11,713,451,530.67	12,682,702,530.67
Alat Besar	8,027,099,000.00	9,514,904,000.00
Alat Angkutan	1,013,033,666.67	1,013,033,666.67
Alat Bengkel	-	-
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,303,464,864.00	1,190,660,864.00
Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	15,850,000.00	11,950,000.00
Alat Ukur	303,600,000.00	303,600,000.00
Alat-Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-

URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Alat Laboratorium	342,755,000.00	342,755,000.00
Alat Keamanan	-	-
Alat Persenjataan	-	-
Komputer	694,899,000.00	305,799,000.00
Alat Eksplorasi	12,750,000.00	-
Alat Pengeboran	-	-
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-
Alat Bantu Eksplorasi	-	-
Alat Keselamatan Kerja	-	-
Alat Peraga	-	-
Peralatan Proses/Produksi	-	-
Rambu-rambu	-	-
Peralatan Olahraga	-	-
Peralatan dan Mesin BOS	-	-
<i>Penyusutan Peralatan dan Mesin</i>	<i>(11,095,057,868.67)</i>	<i>(11,677,553,377.67)</i>
Gedung dan Bangunan	78,545,392,526.00	78,227,857,526.00
Bangunan Gedung	77,783,567,526.00	77,466,032,526.00
Monumen	761,825,000.00	761,825,000.00
Bangunan Menara	-	-
Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-
<i>Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>	<i>(16,865,676,777.00)</i>	<i>(15,292,999,346.00)</i>
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,351,656,773,463.57	1,300,307,072,353.57
Jalan dan Jembatan	1,007,650,491,334.57	963,347,743,615.57
Bangunan Air	245,055,721,873.00	243,842,706,873.00
Instalasi	11,367,170,043.00	12,146,028,043.00
Jaringan	87,583,390,213.00	80,970,593,822.00
<i>Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	<i>(270,900,947,845.00)</i>	<i>(239,541,951,232.00)</i>
Aset Tetap Lainnya	-	-
Bahan Perpustakaan	-	-
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-
Hewan	-	-
Biota Perairan	-	-
Tanaman	-	-
Barang Koleksi Non Budaya	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	149,525,048,373.43	155,665,156,934.43
Konstruksi Dalam Pengerjaan	149,525,048,373.43	155,665,156,934.43
Akumulasi Penyusutan	<i>(298,861,682,490.67)</i>	<i>(266,512,503,955.67)</i>
Akumulasi Penyusutan	<i>(298,861,682,490.67)</i>	<i>(266,512,503,955.67)</i>
Jumlah Aset Tetap	1,370,728,826,017.89	1,358,520,128,003.89
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	-	-
Jumlah Dana Cadangan	-	-
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tak Berwujud	3,178,108,450.00	2,519,329,650.00
Aset Lain-lain	60,597,285,615.00	59,813,427,615.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	<i>(2,249,617,185.00)</i>	<i>(1,489,009,074.00)</i>
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	<i>(15,976,643,284.00)</i>	<i>(15,917,123,224.00)</i>
Dana yang dibatasi Penggunaannya	-	-
Jumlah Aset Lainnya	45,549,133,596.00	44,926,624,967.00
JUMLAH ASET	1,416,295,570,929.89	1,403,525,998,283.45

U R A I A N	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan diterima dimuka	-	-
Utang Belanja	3,033,286.00	5,993,412.00
Utang Transfer	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3,033,286.00	5,993,412.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	-	-
Premium (Diskonto) Obligasi	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	3,033,286.00	5,993,412.00
EKUITAS		
EKUITAS	1,416,265,210,572.48	1,403,492,677,800.04
Surplus/Defisit-LO	-	-
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	27,327,071.41	27,327,071.41
JUMLAH EKUITAS	1,416,292,537,643.89	1,403,520,004,871.45
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,416,295,570,929.89	1,403,525,998,283.45

Calang, 12 Januari 2024
KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN ACEH JAYA

HERI ETIKA, S.T, M.Si
NIP. 19711228 200604 1 002